

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan penduduk yang tinggi di Indonesia merupakan kendala utama peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat dibidang pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan dan lapangan pekerjaan. Kesenjangan yang terjadi antara lapisan penduduk dalam suatu masyarakat pada hekekatnya bersumber dari masalah kemiskinan yang dialami oleh masyarakat yang bersangkutan. Untuk itu setiap upaya untuk mengurangi kesenjangan masyarakat dapat dilepaskan dari upaya menanggulangi masalah kemiskinan itu sendiri.

Upaya pemerintah untuk mengurangi kemiskinan pada hakekatnya sudah diselenggarakan sejak era Pembangunan Jangka Panjang Tahap (PJPT) pertama, meskipun upaya tersebut bersifat makro yang memacu pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya dengan cara memacu pertumbuhan sektor swasta.

Krisis ekonomi Indonesia yang pertama yang dampaknya sangatlah dirasakan oleh masyarakat terjadi pada tahun 1997 dimana pertumbuhan ekonominya mengalami perlambatan yang begitu tajam dalam tingkat pertumbuhannya dari sekitar 4,91% menjadi 13,69%. Akibatnya pendapatan yang ada dimasyarakat berkurang karena banyak pekerja yang diberhentikan dari pekerjaannya sehingga jumlah angka pengangguran semakin bertambah dan jumlah angka kemiskinan semakin meningkat

Sekarang Indonesia mengalami kembali kesulitan dalam bidang ekonomi. Pada saat pergantian kepemimpinan dimana yang diharapkan pemerintah dapat membenahi sistem perekonomian yang ada, ternyata kesulitan masyarakat semakin bertambah. Dengan adanya kebijakan pemerintah yang menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada tanggal 30 September 2005 membuat masyarakat semakin tertekan dan ini sangat dirasakan oleh masyarakat golongan menengah kebawah terutama kaum buruh, tani, nelayan, pegawai kecil dan miskin kota yang selama ini terhimpit beban krisis ekonomi.¹ Walaupun sebelumnya, kenaikan BBM pernah terjadi namun kenaikannya tidaklah sangat berarti karena dampaknya tidak begitu besar bagi masyarakat.

Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak(BBM) ini dipicu oleh harga minyak dunia yang membengkak yang mencapai US\$ 70/barel, untuk itulah pemerintah mempunyai alasan mengapa menaikkan harga BBM karena pemerintah sudah tidak dapat menanggung beban subsidi BBM yang saat ini mencapai 100 triliun rupiah lebih. Subsidi BBM sebesar itu dinilai tidak tepat sasaran karena hanya dinikmati lapisan masyarakat dari kalangan kelas menengah keatas. Karena itu, pemerintah menggantikannya dengan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS BBM).²

Program kompensasi pengurangan subsidi BBM pernah dilakukan oleh pemerintah yaitu pada tahun 2002 dan tahun 2003, dimana program ini terdiri dari Program beras murah, Kesehatan Pendidikan, Bantuan transportasi, Dana

¹www.Yahoo.com "Kenaikan harga BBM, Pengkhianatan kepada rakyat Indonesia"

² "Kenaikan harga BBM, Pengkhianatan kepada rakyat Indonesia"

bergilir koperasi, Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, Bantuan sosial, dan prasarana air bersih dan untuk program tahun 2003 ditambah dengan adanya Bantuan alat kontrasepsi. Namun, program-program ini tidak sepenuhnya berjalan karena dinilai tidak tepat sasaran.

Bahan Bakar Minyak merupakan komoditas ekonomi paling strategis dalam kehidupan masyarakat. Karenanya kenaikan BBM akan sangat berpengaruh terhadap kenaikan harga bahan pokok sehari-hari. Tentu saja harga kebutuhan pokok masyarakat meningkat sedangkan daya beli masyarakat semakin menurun khususnya rumah tangga dengan pendapatan rendah atau rumah tangga miskin. Dengan adanya masalah ini maka pemerintah mencetuskan program kompensasi BBM.

Untuk tahun 2005 Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM meliputi empat bidang yaitu:

1. Bidang Pendidikan yang alokasi dananya sebesar Rp 6,27 trilyun untuk pemberian Biaya Operasional Sekolah (BOS) dalam rangka penuntasan wajib belajar sembilan tahun untuk SD/MI, SLTP/MTs dan salafiah yang sederajat, dan beasiswa reguler untuk tingkat SMA/SMK/MA serta menjamin siswa miskin tetap sekolah.
2. Bidang Kesehatan dialokasikan dana sebesar Rp 3,87 trilyun untuk pemberian pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas dan jaringannya, serta pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah dan swasta (yang ditunjuk) di kelas III dan di Puskesmas

3. Bidang infrastruktur Perdesaan dialokasikan dana sebesar Rp 3,34 trilyun yang dialokasikan kepada desa tertinggal yang membutuhkan penyediaan, peningkatan dan perbaikan dibidang prasarana jalan dan jembatan perdesaan, prasarana irigasi perdesaan dan prasarana air bersih di perdesaan.
4. Bidang Subsidi Langsung Tunai dialokasikan dana sebesar Rp 4.65 trilyun untuk pemberian uang tunai sebesar Rp 100.000/Rumah Tangga/bulan kepada 15,5 juta Rumah Tangga Miskin.

Untuk bidang Subsidi Langsung Tunai(SLT) ini didasarkan pada Instruksi Presiden (Inpres)RI nomor 12 tanggal 10 September 2005 tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai kepada Rumah Tangga Miskin. Program ini diberikan kepada 15,5 juta rumah tangga miskin yang alokasi dananya mencapai Rp 4,65 triliun dengan uang tunai sebesar Rp 100.00/Rumah Tangga/bulan, agar tetap memenuhi kebutuhan dasarnya dan diharapkan kenaikan BBM ini tidak sampai mempersulit masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Program Bantuan Langsung Tunai ini berbentuk uang senilai Rp 1,2 juta per keluarga yang diberikan secara bertahap empat kali dengan rincian Rp 300.00 setiap tiga bulan sekali.

Untuk kepentingan tersebut, pada level operasionalnya pemerintah telah mengadakan kerjasama antara Departemen Sosial dengan PT Bank Rakyat Indonesia(BRI) dan PT Pos Indonesia dalam penyaluran dana BLT tersebut.

Untuk persoalan dana kompensasi, banyak terhadap halangan dan hambatan yang dihadapi dalam masalah penyaluran dana diantaranya:

Pertama, luasnya sebaran masyarakat miskin didesa-desa sehingga mengakibatkan minimnya akses informasi dan komunikasi. Karena penyaluran dana tersebut paling hanya bisa menyentuh pada desa-desa yang bisa diakses, sedangkan masyarakat pedalaman yang kondisinya lebih memprihatinkan tidak banyak berharap untuk mendapatkan dana tersebut. Kedua, belum adanya data primer tentang angka kemiskinan diseluruh desa. Yang dimaksud data primer disini adalah hasil pendataan ulang pemerintah yang dimulai dari tingkat kelurahan, bahkan kalau perlu dari tingkat RT. Karena data dari BPS belum tentu sama dengan realitas dilapangan. Ketiga, belum adanya petunjuk yang jelas langsung kategori keluarga miskin. Keempat, penyaluran bantuan yang diberikan kepada masyarakat akan mendidik masyarakat bersifat konsumtif, bukan produktif karena masyarakat selalu menunggu untuk mendapatkan bantuan. Jadi akan banyak penyalahgunaan dana tidak untuk kepentingan pokok.

Untuk Wilayah Yogyakarta Program ini juga didasarkan atas Keputusan Gubernur Nomor.132.A/KEP/2005 tentang Penetapan nama-nama kepala rumah tangga miskin yang mendapat Subsidi Langsung Tunai (SLT).Namun, keputusan ini dalam pelaksanaannya pada tahap I banyak terdapat kekurangan yaitu nama-nama yang telah ditetapkan tidak tepat sasaran untuk mendapatkan SLT sehingga pada tahap kedua adanya pembatalan atau penghapusan nama.

Penghapusan atau pembatalan nama ini di perkuat dengan adanya Keputusan Gubernur yang kedua yaitu Nomor 13/KEP/2006 tentang

perubahan atas keputusan Gubernur yang pertama yaitu nomor 132.A/KEP/2005.

Untuk Kecamatan Gamping pada tahap pertama yang mendapatkan BLT berjumlah 2.860 orang sedangkan pada tahap kedua berkurang menjadi 2.617 orang. Dan sekitar 243 orang yang dibatalkan dan dihapuskan. Pembatalan atau penghapusan nama-nama yang ada di Kecamatan Gamping tersebut dianggap tidak sesuai dengan kriteria rumah tangga miskin yang telah ditetapkan sehingga mereka tidak layak untuk mendapatkan bantuan. Seperti Rumah Tangga yang mempunyai kendaraan bermotor dianggap telah mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena mampu untuk membeli bahan bakar kendaraan tersebut.

Jadi dalam hal ini baik dalam pelaksanaan terutama dalam hal pendataan memerlukan kerjasama dan koordinasi yang baik dengan berbagai pihak, baik ditingkat kecamatan maupun ditingkat masyarakat yaitu RT/RW untuk mengetahui secara pasti masyarakat yang layak untuk menerima dana kompensasi BBM sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan dari pusat sehingga tidak terjadi salah sasaran dan untuk pelaksanaannya terutama pada saat pembagian dana tersebut benar benar sampai ke tangan yang

B. Perumusan Masalah

Berpijak dari paparan yang telah diuraikan maka muncul pertanyaan untuk dijawab sebagai berikut :

- 1. Bagaimana implmentasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Tahun 2005-2006?*
- 2. Bagaimana Dampak penyaluran BLT tersebut bagi kondisi kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Gamping?*

C. Kerangka Dasar Teori

Kerangka dasar teori adalah teori-teori yang dipergunakan didalam melakukan penelitian sehingga kegiatan ini semakin jelas, sistematis, dan ilmiah. Penulis juga memaparkan definisi dan teori menurut para ahli disertai pula dengan definisi dari kebijakan publik, kemiskinan dan Bantuan Langsung Tunai.

Menurut Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi:

“Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, definisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antara konsep”.³

Sedangkan menurut Koentjoroningrat:

“Teori merupakan pernyataan mengenai sebab akibat atau mengenai adanya suatu hubungan positif antara gejala-gejala yang diteliti disatu atau beberapa faktor tertentu dalam masarakat”⁴

Maka dapat ditarik kesimpulan dari dua definisi diatas bahwa teori merupakan sarana pokok yang mengatakan hubungan sistematis antara fenomena sosial, maupun alami yang hendak diteliti, dan teori-teori yang digunakan sebagai dasar atau pijakan dalam penelitian yang penulis lakukan. Dari definisi-definisi mengenai teori diatas apabila kita hubungkan dengan kerangka dasar teori yang penulis gunakan tentang pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai(BLT) di Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Tahun 2005-2006 maka terbentuk suatu kerangka dasar teori antara lain:

1. Kebijakan Publik

Istilah mengenai kebijakan (*policy*) seringkali digunakan untuk dipertukarkan dengan istilah lain, seperti: tujuanprogram, keputusan, peraturan perundangan, ketentuan, usulan-usulan, rancangan-rancangan besar. Di Indonesia kebijakan atau kebijaksanaan merupakan dua istilah yang hampir mirip namun istilah kebijakan saat ini lebih tepat bagi disiplin ilmu pemerintahan.

Kebijakan (*policy*) adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah dengan cara tertentu yaitu dengan tindakan yang terarah.

Selain itu, James E. Anderson menyebutkan bahwa *policy* adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu.⁵

⁴ Koentjoroningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, PT Gramedia, Jakarta, 1997, hal 9

Menurut Mifta Thoha dalam arti luas *policy* mempunyai dua aspek pokok antara lain:

- a. Policy merupakan praktika sosial ia bukan event yang tunggal atau terisolir dengan demikian sesuatu yang dihasilkan pemerintah berasal dari segala kejadian dalam masyarakat dan dipergunakan pula untuk kepentingan masyarakat.
- b. Policy adalah suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh baik untuk mendamaikan "*claim*" dari pihak-pihak yang konflik atau untuk menciptakan "*incentive*" bagi tindakan bersama dengan pihak-pihak yang menetapkan tujuan akan tetapi mendapatkan perlakuan yang tidak rasional dalam usaha bersama tersebut.⁶

Carl Federik menyatakan "*policy*" adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesepakatan-kesepakatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam jangka mencapai tujuan tertentu.⁷

Setelah dipaparkan mengenai *policy* (kebijaksanaan) maka disini akan diuraikan beberapa definisi *public policy* seperti yang dikemukakan oleh Thomas R. Day:

Public Policy adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan.⁸

⁶ Mifta Thoha, *Disiplin Ilmu Administrasi Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 1992, hal. 57

Definisi diatas kelihatannya hanya bersifat aspirasi sepihak yang perlu disempurnakan yaitu apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk memiliki atau melakukan sesuatu harus mempunyai tujuan tertentu. Namun kebijaksanaan tersebut bukanlah hanya semata-mata keinginan pemerintah tetapi harus diperhatikan juga keinginan tuntutan-tuntutan dari masyarakat.

Dengan demikian di dalam public policy mencakup apa yang dilakukan oleh pemerintah, mengapa mereka melakukannya dan bagaimana akibatnya. Menurut Hogwood dan Gun yang diikuti oleh Abdul Wahab, kebijakan dapat diartikan sebagai suatu proses yang selanjutnya dikemukakan sebagai berikut :

Kalau kita memandang kebijakan sebagai suatu proses, maka pusat perhatian diberikan kepada tahap-tahap yang biasanya dilalui oleh kebijakan itu dan pada umumnya, tahap-tahap atau aspek proses kebijakan tersebut mencakup isu-isu, penyusunan agenda pemerintah, perumusan dan isi kebijakan. Pelaksanaan kebijakan dan program-program evaluasi dampak kebijakan, merevisi kebijakan atau pengakhiran kebijakan.⁹

Selanjutnya SE Anderson menyebutkan bahwa *public policy* adalah: *Policy-policy* yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah.¹⁰

⁹ Abdul Wahab, *Dasar-dasar Analisis Kebijakan Negara*, Pustaka Cipta, Jakarta, 1990, hal 22

Pada definisi ini pengertian *public policy* lebih ditekankan pada pengembangan inisiatif dan peranan pejabat serta lembaga-lembaga pemerintah.

Dari definisi diatas mengenai *public policy* dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kebijakan publik itu harus mengabdikan bagi kepentingan rakyat banyak atau masyarakat, maka kebijakan adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilakukan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.

Adapun dampak dari kebijakan itu ditandai dengan perubahan aktual dalam perilaku atau sikap yang merupakan akibat dari keluarnya kebijakan. Dampak kebijakan merupakan akibat-akibat yang terjadi dari serangkaian tindakan kebijakan yang dilaksanakan. Hasil dari setiap kebijakan tidak sepenuhnya stabil atau diketahui sebelum tindakan dilakukan, tidak semua dari hasil tersebut terjadi seperti yang diharapkan sebelumnya.

Sehubungan dengan hal tersebut maka dalam penelitian ini akan diketahui hasil guna dari kebijakan sehingga dapat memberikan sumbangan pada pencapaian nilai dalam hal ini adalah kebijakan pemerintah terhadap kehidupan sosial masyarakat

2. Kemiskinan

Dewasa ini telah dipakai secara luas bahwa kemiskinan merupakan salah satu masalah yang berat dan kompleks dan pemecahannya tidak mudah. Kemiskinan tidak saja terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar bagi kehidupan yang layak dan kelangsungan hidup bagi beratus-ratus juta orang, melainkan kemiskinan juga secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh berbagai masalah lainnya. Bagi mereka yang tergolong miskin, kemiskinan merupakan sesuatu yang nyata ada dalam kehidupan mereka sehari-hari, karena mereka itu merasakan dan menjalani sendiri bagaimana hidup dalam kemiskinan.

Menurut Bradley R. Schiller yang dikutip oleh Andre Bayo Ala:

“Kemiskinan adalah ketidak sanggupannya untuk mendapatkan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial yang terbatas”¹¹

Sedangkan Emil Salim berpendapat bahwa:

“Kemiskinan biasanya dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok”¹²

Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kemiskinan adalah kurangnya pendapatan sehingga mengalami kesulitan untuk mendapatkan barang-barang dan pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial.

¹¹ Ala Andre Bayo, *Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan*, Liberty, Yogyakarta, 1981, hal 4

¹² E. Salim, *Dasar-Dasar Pembangunan dan Pemerintahan*, Pustaka Pelajar, Jakarta

Menurut Niels Mulder yang dikutip oleh Ala Andre Bayo aktor kemiskinan adalah:

“Mereka yang tidak sampai pada suatu tingkat kehidupan minimal seperti ditunjukkan oleh garis kemiskinan yang mengungkapkan taraf minimal untuk dapat hidup dengan cukup dan wajar. Mereka yang tidak sampai pada patokan itu dipandang sebagai orang miskin”.¹³

Perumusan akan definisi sesungguhnya merupakan sesuatu yang problematik baik pada konsep maupun praktis. Terlebih apabila pendefinisian ini kemudian harus diikuti dengan satu set indikator untuk mengukur secara kuantitatif kelompok masyarakat atau individu mana yang dapat dilaksanakan dimasukkan dalam kategori miskin. Kemiskinan memang dapat diukur dari sisi ekonomi, akan tetapi masih banyak sisi atau dimensi lain yang dapat dipakai sebagai ukuran atau indikator. Dengan kata lain kita secara sengaja melihat kemiskinan dari banyak dimensi serta menggunakan istilah yang dikenal dengan “*Pural Poverty*”.

Istilah “*Pural Poverty*” digunakan untuk menggambarkan banyaknya dimensi kemiskinan, yakni kurangnya akses masyarakat terhadap banyak kebutuhan dasarnya, situasi setiap kelompok masyarakat amatlah berbeda-beda sekelompok orang yang mungkin kekurangan pangan, tetapi mempunyai cukup sandang atau papan, sementara kelompok lain kurang modal, tapi cukup pangan atau kebutuhan dasar lain. Kesimpulan absolut dapat terjadi apabila individu atau satu kelompok

mengalami kekurangan dalam segala hal, sehingga bantuan apapun akan diperlukan.

Friedman (1994) melihat persoalan kemiskinan sebagai persoalan struktural dimana masyarakat miskin tidak mempunyai akses terhadap delapan kekuatan sosial yang mendasar yakni :

- a. Ruang untuk hidup (*defensible life space*)
- b. Surplus waktu (*surplus time*)
- c. Pengetahuan dan keterampilan (*knowledge and skills*)
- d. Informasi yang tepat (*appropriate information*)
- e. Organisasi sosial (*social network*)
- f. Sumber-sumber finansial (*finansial resources*) dan
- g. Alat-alat untuk bekerja dan hidup (*instruments of work and livelihood*).

Penduduk miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya pada kegiatan ekonomi sehingga semakin tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang memiliki potensi lebih tinggi. Sementara itu desa miskin dicirikan oleh potensi lebih tinggi. Sementara itu desa miskin dicirikan oleh potensi sumber daya alam yang terbatas, mutu sumber daya manusia yang rendah, fasilitas perumahan dan lingkungan yang tidak memadai, sarana dan prasarana pelayanan dasar yang tidak lengkap serta kelembagaan sosial ekonomi yang tidak berkembang.

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh wilayah pedesaan

adalah terbatasnya kesempatan kerja di luar sektor

pertanian sehingga pertambahan penduduk senantiasa diikuti oleh meluapnya tekanan atas sumber daya lahan. Wilayah desa miskin yang merupakan pusat kegiatan ekonomi tradisional sekaligus merupakan pusat konsentrasi pemukiman penduduk yang padat. Pada kenyataannya berkembang sesuai dengan kondisi dan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh desa itu sendiri.

Menurut H. Sumitro Maskun, kemiskinan dapat disebabkan oleh empat kategori yaitu :

- a. Karena sulitnya mendapat makanan atau kalah bersaing dalam mendapatkan makanan serta makanan yang didapat tidak mengandung gizi yang cukup atau memenuhi syarat untuk hidup, bekerja dan tumbuh sebagaimana wajarnya.
- b. Karena kesulitan untuk melanjutkan hidupnya karena tidak mendapatkan pekerjaan atau yang tidak mempunyai mata pencaharian untuk menghidupi keluarganya.
- c. Apabila daya beli relatif rendah, hal ini diukur dengan standar kepemilikan uang.
- d. Tidak memiliki harta benda sama sekali.¹⁴

Saat ini terdapat banyak cara untuk mengukur kemiskinan dengan standar yang berbeda-beda. Bank dunia menetapkan bahwa batas garis kemiskinan adalah 50 dollar AS perkapita pertahun untuk daerah pedesaan dan 75 dollar AS untuk daerah perkotaan. Sayogo (1982) mengajukan

¹⁴ H. Sumitro Maskun, *Pembangunan Masyarakat Desa, Asas Kebijakan Keuangan Negara*, MW

masyarakat Indonesia dalam rangka meningkatkan kualitas SDM dalam mewujudkan kesejahteraan lahir batin yang selaras, adil dan merata.¹⁶

3. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Strategi penanggulangan kemiskinan membutuhkan langkah nyata strategi berhasil memenuhi sasaran dan tujuan kebijaksanaan dan program penanggulangan kemiskinan perlu dimanfaatkan pada arah yang benar yaitu ditujukan pada peningkatan kapasitas masyarakat (*capacity building*) pada pemberian akses dan penanggulangan kemiskinan perlu dimanfaatkan pada arah yang benar yaitu ditujukan pada peningkatan kapasitas masyarakat (*capacity building*) pada pemberian akses dan peningkatan ekonomi rakyat. Adapun upayanya meliputi :

Pertama, modal usaha (*investment*) yaitu memberdayakan ekonomi masyarakat dengan mengembangkan mekanisme penyaluran dana bantuan dan kredit lunak kepada masyarakat untuk mengembangkan kegiatan sosial ekonomi produktif yang dapat menjamin adanya surplus untuk tabungan dan akumulasi modal oleh masyarakat.

Kedua, SDM (*human resource*) yaitu memperkuat kapasitas SDM dengan meningkatkan manajemen dan organisasi dalam proses pengembangan guna meningkatkan produktivitas dan daya saing melalui bantuan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan.

Ketiga, sarana (*equipment*) dan prasarana (*infrastructure*) yaitu mengembangkan prasarana dan sarana serta jaringan pemasaran sehingga

¹⁶ CPD/K/1999/1000, No. 11/CPD/1999, PP. 7, Dikt. 1005, hal. 87

masyarakat dengan mudah mendapatkan input produksi dan menjual produk ke pasar melalui kemitraan dengan dunia usaha dan penyediaan jasa pendukung lainnya.

Keempat, penguatan kelembagaan dan pengembangan teknologi (*Institutional strengthenen and technology change*) yaitu upaya meningkatkan alih informasi pembangunan terlembaga dengan baik.

Kelima, sistem informasi (*Information system*) yaitu meningkatkan kemampuan pemantauan pengendalian dan pelaporan pelaksanaan berbasis sistem informasi geografis agar dapat diketahui perkembangan pelaksanaan secara tepat arah. Tepat sasaran dan tempat tujuan.

Sasaran kebijaksanaan dan program penanggulangan kemiskinan sangat terkait dengan pemberdayaan ekonomi rakyat dan khusus masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan demikian sasaran pokok kebijaksanaan penanggulangan kemiskinan adalah :

- a. Meningkatkan pendapatan masyarakat di tingkat bawah dan menurunkannya jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.
- b. Berkembangnya kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kegiatan sosial ekonomi produktif.
- c. Berkembangnya kemampuan masyarakat dan meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat.

Adanya kebijakan pemerintah yang utama untuk menanggulangi

1. Pendistribusian kembali kekayaan, aset dan hasil-hasil negara yang diperuntukkan bagi kalangan miskin.
 - a. Kebijakan bagi kalangan miskin
 - b. Memperbaiki akses terhadap lahan pendidikan dan pelatihan kesehatan dan gizi.
 - c. Mengarahkan kembali produksi dan permintaan (*demand*) menuju ke arah barang-barang konsumsi masa yang secara intensif menyerap kaum buruh melalui perubahan pada beberapa faktor dan harga produksi.
2. Merealokasikan secara marginal sumber-sumber produktif di kalangan kaum miskin.
3. Mentransfer konsumsi secara langsung.¹⁷

Sejak krisis ekonomi melanda Indonesia pada tahun 1997 upaya-upaya penanggulangan kemiskinan terus digalakkan melalui pemberdayaan (*empowerment*) sehingga diharapkan masyarakat akan mampu mengatasi persoalan kemiskinan yang dihadapinya secara berkelanjutan :

- a. Sektor tradisional (pedesaan) khususnya para petani kecil yang tidak terorganisasi dan para buruh yang tidak memiliki lahan garapan.
- b. Sektor informal di perkotaan khususnya industri-industri.

Sedangkan dalam program pembangunan nasional 2000-2004 disebutkan bahwa penanggulangan kemiskinan terdapat 2 strategi utama

yang ditempuh *pertama*, melakukan berbagai upaya dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan melindungi keluarga dan kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara akibat berdampak krissi ekonomi dan kemiskinan struktural.

Kedua, melakukan berbagai upaya untuk membantu masyarakat yang mengalami kemiskinan struktural antara lain memberdayakan mereka agar mempunyai kemampuan yang tinggi untuk melakukan usaha dan mencegah terjadinya kemiskinan baru.¹⁸

Mengingat kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan multidimensi diperlukan strategi penanggulangan yang komprehensif yang meliputi kebijakan makro dan lintas sektoral seperti :

- a. Percepatan ekonomi yang berkelanjutan.
- b. Pengendalian pertumbuhan penduduk
- c. Peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan, perluasan akses bagi usaha mikri, kecil, menengah dan koperasi (UKMK) terhadap sumber pembiayaan teknologi dan pasar.
- d. Percepatan pembangunan desa.

4. Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini merupakan suatu program yang diberikan oleh pemerintah sebagai dana kompensasi atas kebijakan dari pemerintah terhadap kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Program ini berupa dana yang diberikan langsung kepada rumah tangga miskin yang didasarkan dengan hasil pendataan yang telah dilakukan oleh Biro Pusat Statistik dengan melibatkan berbagai pihak atau sumber, antara lain:

1. Pemerintah Daerah
2. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
3. Daftar keluarga miskin yang menerima pembebasan biaya sekolah dan perawatan kesehatan
4. Ketua RT/satuan lingkungan sosial terkecil.

Dalam hal ini pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 4,65 triliyun ini diberikan kepada Rumah tangga miskin sebanyak 15,5 juta KK yang tersebar diseluruh Indonesia dengan besar bantuan Rp 100.000,-/bulan/rumah tangga dengan dibayarkan per 3 bulan yaitu Rp 300.000,-. Bantuan ini akan diberikan secara bertahap yaitu empat kali. Namun sekarang pelaksanaan BLT baru sampai pada tahap kedua.

Untuk menghindari adanya salah sasaran terhadap penerimaan program ini maka adanya pendataan yang benar-benar valid dan disesuaikan dengan kriteria rumah tangga miskin yang telah ditentukan serta memerlukan keterlibatan banyak pihak termasuk masyarakat/tingkat RT.

Bagi Rumah tangga yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan dana bantuan maka akan mendapatkan kartu sebagai tanda pengenal dalam

Jadi suatu kebijakan publik itu harus mengabdikan bagi kepentingan rakyat banyak atau masyarakat, maka kebijakan adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilakukan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.

2. Kemiskinan

Banyak dimensi untuk menggambarkan kemiskinan salah satunya adalah kurangnya pendapatan, sehingga mengalami kesulitan untuk mendapatkan barang-barang kebutuhan pokok manusia dalam sehari-hari disertai dengan tidak terpenuhinya pelayanan yang tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan sosial.

3. Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Merupakan program bantuan yang diberikan oleh pemerintah terhadap adanya kebijakan kenaikan BBM (Bahan Bakar Minyak). BLT ini diberikan dalam bentuk uang tunai yang diberikan kepada rumah tangga miskin sebesar RP 100.000,-/Bulan/Rumah Tangga dan dibayarkan per 3 bulan.

E. Definisi Operasional

Definisi Operasional merupakan unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel atau dengan kata lain sebagai pihak penunjuk pelaksana bagaimana mengukur suatu variabel untuk mempermudah penelitian.²⁰

²⁰ *Ibid*, hal 46

Dengan menggunakan landasan diatas maka definisi operasional dari penelitian ini adalah:

- a. Pra pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT)
 - Ketepatan pendataan oleh petugas pendata
 - Petugas yang melakukan pendataan langsung
 - Kesesuaian kriteria dengan kondisi Rumah Tangga Miskin
 - Ketepatan keluarga atau Rumah Tangga miskin yang mendapatkan BLT
- b. Pelaksanaan
 - Sikap Pelayanan Petugas dalam membagikan dana BLT
 - Jalannya pengambilan BLT
- c. Sesudah Pelaksanaan
 - Kesesuaian bantuan yang diberikan dengan harapan masyarakat
 - Kemampuan membantu perekonomian keluarga

F. Metode Penelitian

1. Tujuan dan Manfaat Penelitian

- Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian, tentunya ada tujuan yang ingin dicapai. Maka pada penelitian ini penulis bertujuan:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan terhadap penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diadakan di Kecamatan gamping

- b. Untuk mengetahui sejauh mana penyaluran yang telah dilakukan di

c. Untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

- **Manfaat Penelitian**

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada dunia ilmu pengetahuan khususnya ilmu pemerintahan dan memberikan sumbangan pemikiran bagi pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Gamping Tahun 2005-2006.

2. **Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini menitik beratkan pada penelitian lapangan (*field research*), dengan tidak menyampingkan studi kepustakaan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian dengan cara menerangkan, menjelaskan, menggambarkan serangkaian peristiwa, fenomena atau fakta yang berkenaan dengan masalah dan unit-unit penelitian lapangan secara jelas serta terperinci.²¹

3. **Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini, penyusun akan mengadakan penelitian di Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman. Penyusun melakukan penelitian di lokasi tersebut karena tertarik ingin mengetahui secara jauh terhadap pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai yang diberikan kepada Rumah Tangga Miskin dan apakah penyaluran yang diberikan sudah tepat sasaran dan telah sesuai dengan kriteria Rumah Tangga Miskin yang telah

²¹

ditetapkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan ingin mengetahui dampak yang ditimbulkan terhadap perekonomian setelah mendapatkan BLT.

4. Unit Analisis

Sesuai dengan permasalahan yang ada pada pokok permasalahan, maka penyusun akan melakukan kegiatan yaitu menyusun unit analisisnya pada pihak-pihak yang terkait dan relevan dalam menyusun karya tulis ini.

Unit analisis yang penyusun tentukan dalam penelitian ini adalah :

- Staf Kecamatan Gamping
- Petugas BPS Gamping
- Petugas Kantor Pos
- Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT)

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini, teknik pengumpulan data sangat penting, sebab merupakan cara dalam mengumpulkan data yang akan mendukung penelitian. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah:

a. Wawancara

Yang dimaksud wawancara menurut Sutrisno Hadi adalah sebagai suatu proses tanya jawab secara lisan dimana seseorang atau beberapa orang saling berhadapan mendengar secara langsung. Merupakan alat pengumpulan data atau informasi yang langsung tentang berbagai jenis data atau informasi yang langsung tentang berbagai jenis data

... dan ...

Jadi wawancara adalah sejumlah cara untuk mengumpulkan data dengan jalan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penelitian dengan saling bertatap muka dan mendengar secara langsung dengan pihak-pihak yang diwawancarai.

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan berbagai pihak yaitu dengan staf yang ada dikecamatan yang menangani masalah BLT dan juga dengan petugas yang ada di Kantor Pos kecamatan Gamping sebagai pihak yang membagikan atau menyalurkan dana kepada masyarakat yang menerima BLT serta dengan mewawancarai beberapa penerima BLT itu sendiri.

b. Observasi

Merupakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis dan sengaja terhadap pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai(BLT).

c. Dokumentasi

Yakni usaha melengkapi data yang penyusun perlukan dalam kaitannya dengan hal pengumpulan data khususnya untuk menggali data sekunder tentang deskripsi wilayah penelitian. Sumber datanya berupa catatan atau dokumen yang tersedia. Seperti data monografi wilayah kecamatan dan data-data mengenai pelaksanaan BLT dan juga didukung dengan sumber lain seperti Instruksi Presiden dan Keputusan